

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press. 2015
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Jann Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2003

- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87M.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan ke-16*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- P.A.F Lamintang, (et.al) *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Universitas Unair, Surabaya, 1997
- R. Soesilo, *Taktik dan teknik penyidikan perkara kriminil*, Politea, Bogor, 1980
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011
- Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid 1*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Aldi Subartono, *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang*. Journal Article; USU Law Journal; Vol.2 No.3
- Anne Safrina, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Hukum Vol. 29 No. 1
- Asep Supriyanto, *Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Fakultas Unissula, 2017
- Benny Sumardiana, *Analisis Yuridis Larangan Bomb joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme*, Jambura Law Review, 1.1

(2019), <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1865> >diunduh pada 30 Agustus 2020 pukul 20:35

Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Mediasi di Luar Pengadilan*, Jurnal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019

Febmi Ririn, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian*, Tesis, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017

Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Johana Olivia Rumajar, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen* Vol. III/No.4/Ags-Nov/2014

Mochammad Abadi Subagja, “Kedudukan, tugas, wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016

Muh. Riza Hidayat R, “Tinjauan yuridis peran PPNS Bea Cukai dalam menangani tindak pidana penyeludupan minuman yang mengandung etil alcohol (studi kasus kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pebean A bandara halim perdanakusuma jakarta timur)”, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014

- Muhammad Pradika Setia Agafta Adianto, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 2017. >diunduh pada 29 Agustus 2020 pukul 21:30
- Siti maimana, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2, 2013
- Teguh Arif Setiawan, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, 2017.>diunduh pada 30 Agustus 2020 pukul 20:34

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

#### D. Sumber Lainnya

\_\_\_\_\_ *Tujuan Hukum Pidana* <https://kelashukum.com/2019/10/19/tujuan-hukum-pidana/> , tanpa nama pengarang dan tanpa tahun.

Anis Rifai, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*

<https://www.scribd.com/document/69573173/Eksistensi-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Proses-Penegakan-Hukum-Di-Indonesia>

Fery Pradolo, *Bercanda soal Bom Saat Transit di Makassar, PNS Merauke Berurusan dengan PPNS,*

<https://www.liputan6.com/regional/read/3502065/bercanda-soal-bom-saat-transit-di-makassar-pns-merauke-berurusan-dengan-ppns>> dikunjungi pada tahun 2020

Ilman Hadi, *Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/> Dikunjungi pada tahun 2020

Rudi Richardo, *Modul Materi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penerbangan,* Manado, 2021

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 2012